

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI
SERTA PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN
TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok*



OLEH:

CHARLES RONAL BEJO

NIM: 181000462201023

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
2022**

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI
SERTA PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN
TANAH DATAR**

CHARLES RONAL BEJO
181000462201023

Pembimbing 1 : Dr. Lili Wahyuni, S.E., M.Si.

Pembimbing 2 : Witra Maison, S.E., M.Si.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* (X1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y), Pemahaman Akuntansi (X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y), Pengendalian Akuntansi (X3) terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y) serta pengaruh secara simultan *Good Governance* (X1), Pemahaman Akuntansi (X2) dan Pengendalian Akuntansi (X3) terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y). penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode total sampling, dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala OPD, bendahara OPD dan Kepala Sub Bagian Keuangan OPD yang berada di Kabupaten Tanah Datar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *Good Governance* (X1) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y). Hasil ini dibuktikan dengan t_{hitung} sebesar 11,840 > t_{tabel} sebesar 1,675 dan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$. Pemahaman Akuntansi (X2) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y). Hasil ini dibuktikan dengan t_{hitung} sebesar 6,016 > t_{tabel} sebesar 1,675 dan nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$. Kemudian, Pengendalian Akuntansi (X3) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y). Hasil ini dibuktikan dengan t_{hitung} sebesar 2,796 > t_{tabel} sebesar 1,675 dan nilai signifikansinya sebesar $0,007 < 0,05$. Serta *Good Governance* (X1), Pemahaman Akuntansi (X2) dan Pengendalian Akuntansi (X3) terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y). Hasil ini dibuktikan dengan F_{hitung} sebesar 134,300 > F_{tabel} sebesar dan nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: *Good Governance (X1), Pemahaman Akuntansi (X2), Pengendalian Akuntansi (X3), Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y).*

**THE EFFECT OF GOOD GOVERNANCE AND ACCOUNTING
UNDERSTANDING AND ACCOUNTING CONTROL ON
ACCOUNTABILITY PERFORMANCE OF REGIONAL DEVICE
ORGANIZATIONS IN DISTRICT TANAH DATAR**

CHARLES RONAL BEJO
181000462201023

Mentor 1 : Dr. Lili Wahyuni, S.E., M.Si.

Mentor 2 : Witra Maison, S.E., M.Si.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Good Governance (X1) on Accountability of Regional Apparatus Organizational Performance (Y), Accounting Understanding (X2) of Regional Apparatus Organizational Performance Accountability (Y), Accounting Control (X3) of Regional Apparatus Organizational Performance Accountability (Y) and the simultaneous influence of Good Governance (X1), Accounting Understanding (X2) and Accounting Control (X3) on the Accountability of Regional Apparatus Organizational Performance (Y). This research is a quantitative research with an associative approach. The type of data used in this study is primary data. The data of this study were obtained from the distribution of questionnaires. This research was carried out using the total sampling method, where all members of the population were sampled. The samples in this study were the Head of the OPD, the OPD treasurer and the Head of the OPD Finance Sub Division in Tanah Datar Regency.

The results showed that partially Good Governance (X1) had an effect on the Accountability of Regional Apparatus Organizational Performance (Y). This result is evidenced by the tcount of 11,840 > ttable of 1,675 and the significance value of 0.000 < 0.05. Understanding of Accounting (X2) affects the Accountability of Regional Apparatus Organizational Performance (Y). This result is evidenced by the tcount of 6.016 > ttable of 1.675 and the significance value of 0.000 < 0.05. Then, Accounting Control (X3) affects the Accountability of Regional Apparatus Organizational Performance (Y). This result is evidenced by the tcount of 2.796 > ttable of 1.675 and the significance value of 0.007 < 0.05. And Good Governance (X1), Accounting Understanding (X2) and Accounting Control (X3) on Accountability of Regional Apparatus Organizational

Performance (Y). This result is evidenced by the Fcount of 134.300 > Ftable of 2.79 and the significance value of 0.000 < 0.05.

Keywords: Good Governance (X1), Accounting Understanding (X2), Accounting Control (X3), Accountability of Regional Apparatus Organizational Performance (Y).



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah sebagai organisasi sektor publik, diberikan wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri dengan berpedoman pada kaedah otonomi daerah yang berlaku. Pemerintah daerah juga dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan selalu tanggap dengan lingkungannya dengan memberikan pelayanan publik yang terbaik secara berkualitas dan transparan. Dalam aspek akuntabilitas, program-program pemerintah harus berorientasi pada hasil, manfaat atau *output* dan *outcome* program-program tersebut (Nasir dan Gunawan, 2019).

Perangkat daerah merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada daerah Kabupaten/Kota perangkat daerah terdiri dari Sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah memiliki tugas yaitu membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, penyelenggaraan dan pengoordinasian administrasi, serta melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Dalam mencapai tujuannya perangkat daerah memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, yaitu dengan memberikan pelayanan terbaik terhadap publik demi terciptanya kesejahteraan pada masyarakat serta meningkatkan kepercayaan

masyarakat bahwa pemerintah dapat melaksanakan tugas atau kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan wewenang yang telah diberikan (Melianawati dan Setiawati, 2021).

Kinerja aparat pemerintah selalu menjadi sorotan banyak pihak dan sebagian besar mempengaruhi kinerja sektor publik. Kuantitas kinerja diukur dari apresiasi aparat pemerintah terhadap hasil dari jumlah aktivitas yang ditugaskannya dan kualitas diukur dari apresiasi aparat pemerintah terhadap keterampilan dan kemampuan dari pekerjaan yang telah dikerjakannya. Ukuran kinerja dalam suatu organisasi guna untuk evaluasi dan perencanaan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu kinerja yang tinggi dalam suatu organisasi mengandung arti adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi oleh anggota dalam mengerjakan atau menyelesaikan serangkaian tugasnya.

Pada saat sekarang ini, Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah sering disoroti karena Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah terlihat tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat. Masih banyak ditemukan beberapa pemerintah daerah atau instansi pemerintah yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya masih belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian tersebut salah satunya adalah dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan melalui Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah, yang mana masih belum baik dan hasil tinjauan penilaian yang tidak ditindaklanjuti. Salah satu permasalahannya yaitu terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tanah Datar yang terjadi pada tahun 2019. Dimana hasil pemeriksaan atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, Kabupaten Tanah Datar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, pada bulan September 2019 ada tindakan KKN yang dilakukan oleh kepala Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan (koperindag) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap proyek pembangunan pasar Koto Baru, Kecamatan X Koto yang ditangani oleh Polres Tanah Datar (*m.antaranews.com*, 2019)

Akuntabilitas Kinerja memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Tanggung jawab ini menentukan tujuan dan sasaran hidup bagi organisasi tersebut. Di dalamnya dijelaskan substansi tujuan, visi dan misi organisasi, peran dan arahan yang seharusnya diwujudkan oleh organisasi. Secara teoritis, kerja para pegawai akan jadi terarah dengan adanya tujuan untuk memperbaiki pengarahannya (Hidayat et al., 2021). Akuntabilitas kinerja diperlukan sebagai pertanggung jawaban terhadap kinerja. Hasil kerja dari pegawai pemerintah dapat diketahui melalui informasi Akuntabilitas dari masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas diperlukan oleh pemerintah, karena berdasarkan informasi tersebut menjadi bahan pengambilan keputusan pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik (Nurlaela, 2015). Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala pemerintah sebagai penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Maka dari itu, untuk meningkatkan

kualitas Akuntabilitas Kinerja dalam suatu organisasi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu *Good Governance*, Pemahaman Akuntansi dan Pengendalian Akuntansi.

Good Governance yang dalam istilah bahasa memiliki arti tata kelola yang baik dimana menjadi tantangan bagi semua sektor, terutama sektor publik di Indonesia. Salah satu penyebab utama *Good Governance* harus diimplementasikan karena masih kurang maksimalnya kinerja suatu Pemerintah Daerah. *Good Governance* diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha ataupun berkarya. *Good Governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik (Hidayat et al., 2021). *Good Governance* juga dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien. Sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab (*accountable*) pada publiknya yang diharapkan akan mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid. *Good Governance* juga harus memiliki tanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien. Pada dasarnya hal ini adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung-

jawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga Negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara. Penelitian yang dilakukan oleh (Nasir dan Gunawan, 2019) menyatakan bahwa *Good Governance* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bandung Barat. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al., (2021) menyatakan bahwa *Good Governance* tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar.

Faktor kedua yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja yaitu Pemahaman Akuntansi. Pemahaman Akuntansi merupakan sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan maupun sebagai proses atau praktik. Pemahaman Akuntansi dapat dipandang dari dua sisi pengertian yaitu sebagai pengetahuan propesi yang di praktekan di dunia nyata dan sekaligus sebagai suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi dipahami (Fibriyani et al., 2021). Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan. Pemahaman Akuntansi sangatlah berguna bagi aparat yang bertugas dibagian tersebut, fungsinya adalah untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam laporan keuangan. Hal ini tentunya berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Pemahaman Akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja yaitu

meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban kegiatan dengan menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh (Karima, 2021) menyatakan bahwa secara parsial Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Tomasoa, 2021) menyatakan bahwa Pemahaman Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Faktor ketiga yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja yaitu Pengendalian Akuntansi. Pengendalian Akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini yang termasuk pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi (Yulianto dan Muthaer, 2019). Pengendalian Akuntansi memungkinkan para manajer dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Pengendalian Akuntansi pada instansi pemerintah dapat mengontrol dan mengevaluasi seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan. Pengendalian akuntansi dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut telah ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, ini merupakan salah satu

indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan. Untuk menilai efektif atau tidaknya Akuntabilitas Kinerja maka harus dilakukan penilaian mulai dari perencanaan sampai hasil dari realisasi anggaran yang telah disusun. Karena dengan tidak optimalnya proses perencanaan anggaran yang mengabaikan prinsip keuangan daerah yang baik akan berdampak pada Akuntabilitas Kinerja pemerintah. Sehingga untuk menghindari permasalahan tersebut maka diperlukan Pengendalian Akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari sektor publik. Penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani dan Utama, 2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Kota Denpasar. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al., (2021) menyatakan bahwa Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar.

Dengan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, mendorong peneliti untuk melakukan pengukuran pengaruh antara *Good Governance* dan Pemahaman Akuntansi serta Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh *Good Governance* dan Pemahaman Akuntansi serta Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Tanah Datar.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Good Governance* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanah Datar.
2. Apakah Pemahaman Akuntansi berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanah Datar.
3. Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanah Datar.
4. Apakah *Good Governance* dan Pemahaman Akuntansi serta Pengendalian Akuntansi berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanah Datar.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin penulis capai berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanah Datar.

4. Untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* dan Pemahaman Akuntansi serta Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pijakan untuk mengembangkan serta mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan sistem pemerintahan terhadap masyarakat.
2. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu sumbangan pemikiran dan masukan untuk pemerintah daerah berupa saran-saran positif mengenai *Good governance*, Pemahaman Akuntansi, serta Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
3. Dan bermanfaat sebagai tambahan informasi, bahan masukan serta pengetahuan dalam menilai Akuntabilitas Kinerja khususnya dalam Organisasi Perangkat Daerah untuk peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan di uraikan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar yang mendukung penelitian, kerangka berfikir dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini akan dibahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan variabel-variabel yang ada dalam penelitian, serta definisi operasional dari penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, dan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *Good Governance* (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *Good Governance* maka akan semakin baik kualitas Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar.
2. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemahaman Akuntansi (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap akuntansi maka semakin baik pula kualitas Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar.
3. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Pengendalian Akuntansi

maka semakin baik pula kualitas Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

4. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *Good Governance* (X1) dan Pemahaman Akuntansi (X2) serta Pengendalian Akuntansi (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y). sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *Good Governance*, semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap akuntansi, dan semakin tinggi tingkat Pengendalian Akuntansi maka semakin baik pula kualitas Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, agar lebih memaksimalkan penerapan *good governance* pada masing-masing OPD Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dikarenakan selama penelitian, peneliti menemukan di beberapa OPD Kabupaten Tanah Datar yang belum memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan kritik, saran terhadap kinerja pelayanan OPD Kabupaten Tanah Datar.
2. Bagi seluruh OPD Pemerintah Tanah Datar, agar meningkatkan pemahaman akuntansi pada pegawai masing-masing OPD, hal ini dikarenakan selama penelitian, peneliti menemukan penyusunan dan

penyajian laporan keuangan masing-masing OPD yang belum mencapai tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun entitas.

3. Bagi seluruh OPD Pemerintah Tanah Datar, agar memaksimalkan pengendalian akuntansi pada masing-masing OPD Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dikarenakan selama penelitian, peneliti menemukan pengendalian akuntansi pada beberapa OPD yang masih kurang maksimal, sehingga pada pemeriksaan BPK, terdapat temuan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tanah Datar tahun 2021.
4. Bagi pemerintah daerah perlu memperhatikan *Good Governance* dan Pemahaman Akuntansi serta Pengendalian Akuntansi dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Karena dengan adanya *Good Governance* dan Pemahaman Akuntansi serta Pengendalian Akuntansi akan mendorong meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan guna untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dimasa yang akan datang.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lain seperti Partisipasi Penyusunan Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran dan untuk melihat hubungannya terhadap Akuntabilitas Kinerja dan penelitian dilakukan pada objek yang berbeda sehingga hasil dari penelitian dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, Y. (2020). *Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo)*.
- Cahyani, N. M. M., & Utama, I. M. K. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(3), 825–840.
- Claraini, C. (2017). Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. *Jom Fekon*, 4(1), 3110–3123.
- Fauzan, R. H. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. *JOM Fekon*, 4(1), 1122–1136.
- Fibriyani, D. A., Seri Ekayani, N. N., & Manuaba, I. B. M. P. (2021). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kab. Gianyar. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(1), 11–16. <https://doi.org/10.22225/jraw.2.1.2927.11-16>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harianto, D. & K. (2021). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*. 6(1), 122–139. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i1.111>
- Hartono, N. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data* (Edisi ke 2).
- Hasibuan, J. R. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada SKPD Padang Lawas). *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*.
- Haslinda. (2021). *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene*. 6.
- Hidayat, T., Mustika, A., & Murialti, N. (2021a). Pengaruh Good Governance, Kompetensi, Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, 1, 87–97.

- Hidayat, T., Mustika, A., & Murialti, N. (2021b). *Pengaruh Good Governance , Kompetensi , Dan Pengendalian Akuntansi. 1*, 87–97.
- Karima, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 10(06), 10–24.
- Karima, D., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Sampang. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(06), 10–24.
- Kinasih, H. (2018). (*Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Magelang)*).
- m.antaranews.com, (2019). <https://www.antaranews.com/berita/1080808/polres-tanah-datar-amankan-rp20-juta-ott-kadis-koperindag-tanah-datar>
- Melianawati, A., & Setiawati, E. (2021). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran , Desentralisasi , dan Motivasi*. 131–137.
- Nasir, A., & Gunawan, A. (2019). Implementasi Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 760–766.
- Nurlaela, W. S. (2015). Pengaruh Good Government Governance Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis). *Junal UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA*, 1–20.
- Oktaviani, A. (2021). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pelaporan, Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Pada Opd Pemerintah Kota Medan)*. 6.
- Oktaviani, S. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi*. 484–494.
- Sekaran, U. (2011). *Research Method For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. In *Salemba Empat*. Jakarta.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis_Pendekatan Pengembangan Keahlian Buku 2*.
- Setiawan, E. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian

Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1–14.

Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.)). ALFABETA.

Tomasoa, T. F. (2021). Peran Internal Audit, Pemahaman Akuntansi Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Persepsi *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JPE)*, 1(Sunarsip 2001), 37–43.

Wea, S. A. (2021). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangat Daerah di Kabupaten Nagekeo*. Universitas Flores.

Yudhasena, I. G. I., Asri, I. G. A. M., & Putri, D. (2019). Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern, Dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 434–464.

Yulianto, A. R., & Muthaher, O. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati. *Tirtayasa Ekonomika*, 14(2), 204. <https://doi.org/10.35448/jte.v14i2.6478>

Zulharman, K. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Pekanbaru. *Jom FEKON*, Vol. 2 No.(1).